



JI 3 (1) (2018)

JPK**Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**<http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>**KAJIAN ISU TOLERANSI BERAGAMA, BUDAYA,
DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL MEDIA**

Eko Digdoyo✉

Info Artikel**Sejarah Artikel:**

Diterima November 2017

Disetujui Desember 2017

Dipublikasikan Januari

2018

Keywords:*Religion, Culture, and
Media***How to Cite:**

Eko Digdoyo (2018).
Kajian Isu Toleransi
Beragama, Budaya, dan
Tanggungjawab Sosial
Media : Jurnal Pancasila
dan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, Vol 3 No 1 :
Halaman 42 - 59

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk memperdalam fenomena sosial terkait persoalan toleransi agama, budaya dan peranan media. Saat ini eksistensi media baik cetak, elektronik, maupun media sosial dipandang perlu dijadikan pertimbangan kajian. Alasan mendasar adalah bahwa saat ini media merupakan bagian terpenting dalam mempublikasikan penanganan kasus perbedaan aliran, faham, dan gerakan sosial beragama di masyarakat, bahkan media umumnya dapat menggerakkan tatanan kehidupan masyarakat. Jadi kajian ini memiliki ruang lingkup yang cukup penting khususnya mengenai peran media dalam memublikasikan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan dan praktek toleransi agama dan budaya. Media dalam hal ini dianggap sebagai bagian dari agen dan pengendali sosial khususnya dalam memberitakan atau menginformasikan nilai-nilai kebebasan dan perlindungan beragama di masyarakat.

Abstract

The purpose of this study is to deepen social phenomena related to issues of religious tolerance, culture and the role of the media. Nowadays, the existence of printed, electronic, or social media is regarded as a consideration of a study. The fundamental reason is that media is currently the most important part in publishing the handling of religion, ideology, and social religious move cases within society. Generally, media is capable of stirring the order of society life. Therefore, this study has fairly important scope, specifically, in the role of publishing the moral principle of Divinity and Humanity and the practice of religion and culture tolerance. In this case media is assumed as a part of agents and social controllers, particularly in informing the value of religious freedom and protection in the community.

© 2018 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

✉ **Alamat korespondensi:****Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta****E-mail:** ekodigdoyo77@yahoo.co.id**ISSN 2527-7057 (Online)****ISSN 2549-2683 (Printed)**

PENDAHULUAN

Latar belakang

Temakajian tentang toleransi agama dan budaya umumnya telah banyak dikemukakan oleh para sarjana. Berbagai penelitian juga telah dilakukan baik di Perguruan Tinggi Umum maupun Perguruan Tinggi Agama. Namun demikian pada kesempatan ini penulis ingin berkontribusi melalui analisis yang terjadi terkait peran dan tanggungjawab sosial media terkait implementasi ideologi Pancasila khususnya sila pertama dan kedua.

Mengawali kajian ini perlu diungkapkan bahwa manusia adalah makhluk beragama (*human religius*), beragama adalah memotivasi untuk memanusiaikan manusia. Tujuan manusia beragama adalah agar pola hidup lebih teratur, terarah, terkontrol, dan terkelola dengan baik berdasarkan jalan kehidupan yang benar dan jalan yang diridhoi Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) melalui kegiatan ritual beribadah. Beribadah adalah kegiatan ritual beragama dan menjadi hak individu yang bermakna sosial. Untuk itu, praktek ibadah di samping telah diatur dalam tuntunan ibadah melalui kitab suci masing-masing, negara turut hadir untuk mengatur melalui perundang-undangan, organisasi sosial keagamaan, dan kelompok aliran tertentu.

Selanjutnya, jika melihat kenyataan masyarakat Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks termasuk di dalamnya menyangkut aliran kepercayaan. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut, dikenal dengan istilah masyarakat multi-religius (Achmad, 2001:44-45).

Artinya, Indonesia memiliki banyak agama, aliran, faham, dan gerakan organisasi keagamaan lainnya dan pada saatnya seringkali terjadi perbedaan prinsip dalam menjalankan kegiatan ritual keagamaan. Prinsip-prinsip kegiatan ritual itulah yang seringkali melekat pada pengikut aliran yang dapat dikatakan

sangat sentimen. Sentimen-sentimen (fanatisme) pada aliran kepercayaan, faham, dan gerakan keagamaan di Indonesia yang berlebihan, sering kali menimbulkan konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal.

Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, pluralitas telah melahirkan kolaborasi yang indah dalam berbagai bentuk muzaid budaya yang kental dengan kemajemukan. Artinya berbagai suku, agama, ras adat-istiadat, budaya dan golongan dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan toleransi. Kuntowijoyo (1985) menjelaskan bahwa keindahan masyarakat negeri katulistiwa seperti Indonesia menjadi kesaksian bagi dunia internasional. Akan tetapi, dunia pun “terhentakkan dengan tercabik-cabiknya” keindahan oleh sikap eksklusif yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama, ras, dan golongan tertentu dalam bentuk konflik. Berbagai konflik yang dilatarbelakangi oleh agama, etnis, bahasa, ekonomi, dan politik tidak bisa dihindari (Rasimin, 2016:100)

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, baik dalam eskalasi besar maupun kecil telah membawa korban jiwa, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia. Nampaknya kerusuhan sosial telah menjadi gejala yang umum bagi perjalanan hidup bangsa. Dari tahun 1996 tercatat terjadi beberapa kali peristiwa/konflik yang bernuansa sosial agama, seperti kerusuhan di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13, 15, 17 Mei 1998, yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Medan, Ambon, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa Timur (Situbondo), Jawa Tengah (Temanggung), Yogyakarta, Jawa Barat (Cirebon, Indramayu), Banten, dan di DKI Jakarta serta peristiwa-peristiwa kerusuhan lainnya.

Meskipun akhir-akhir ini tidak ditemukan konflik sosial secara fisik, namun konflik melalui media terutama media sosial, isu keragaman dalam beragama sering menjadi obyek saling fitnah melalui berita bohong (*hoax*) dengan menggunakan kendaraan politik pada saat menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

Beberapa rentetan terjadinya kerusuhan di Indonesia yang lebih condong bernuansa sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Termasuk studi kasus intoleransi terjadi di Ibu Kota ketika sedang menghadapi PILKADA. Konflik intoleransi telah mengkristal dengan menggunakan dalih agama, budaya, politik, etnis, dan media sebagai alat pemicu.

Secara normatif-doktrinal, agama apapun sama-sama mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kerukunan individu dan kelompok. Jadi, sebetulnya agama tidak menghendaki konflik perpecahan, permusuhan, bahkan pembunuhan baik fisik maupun karakter umat lain. Namun dalam kenyataannya, yang ada menunjukkan pengaruh agama terhadap perilaku masyarakat sering menimbulkan konflik.

Para ahli sejarah atau ilmuwan sosial menyatakan, bahwa agama sering mempunyai efek yang negatif terhadap kesejahteraan manusia. Isu-isu keagamaan sering dijadikan isu timbulnya konflik baik fisik maupun non fisik apalagi dibumbui dengan isu bohong. Keyakinan dalam suatu agama sering menimbulkan sikap manusia yang tidak toleran (intoleransi). Kemudian loyalitas dalam agama hanya dapat menyatukan beberapa orang saja dan memisahkan diri dari kebanyakan orang atau kelompok lainnya (Majid, 1992:47).

Secara sosiologis, konflik sosial memang lumrah terjadi, untuk itu diperlukan teori dan metode manajemen konflik dalam rangka menuju rekonsiliasi dan kesepakatan membuat komitmen perubahan (ke arah yang positif). Namun demikian persoalan mayoritas dan minoritas dapat menjadi sumber konflik,

sedangkan stabilitas nasional menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional (Ishamudin, 1996:24).

Oleh sebab itu, masalah kerukunan antar umat beragama dan budaya, serta aliran kepercayaan yang ada, secara lokal maupun nasional adalah masalah besar yang tidak boleh diabaikan dan harus terus-menerus memperoleh perhatian yang serius dari semua pihak sebab jika merujuk dasar ideologi bangsa pada sila pertama dan kedua merupakan ajaran manusia Indonesia untuk berke-Tuhanan. Jadi, jika konflik yang berlatarbelakang agama sering terjadi, maka dapat menghancurkan nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan manusia (Coleman, 2008:74). Lantas bagaimana praktek sila pertama dan kedua tersebut dijalankan?

Permasalahan kerukunan hidup antara umat beragama di Indonesia, seperti halnya pada umat-umat beragama di negeri lainnya. Kenyataan seperti itu tidak jarang mencuat ke permukaan oleh pemberitaan media cetak dan elektronik. Secara kontekstual kerukunan antara umat beragama ini bisa menjadi labil, padahal begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis (dalam Islam), Alkitab (dalam Kristen), dan kitab-kitab agama lainnya selalu menganjurkan, menyerukan, dan bahkan memerintahkan umatnya selalu melakukan hal-hal yang positif guna mencapai kerukunan, perdamaian, persatuan, dan kesatuan serta cinta dan kasih kepada sesama (Fatwa, 2007:27).

Konflik sosial sebagaimana dimaksud mestinya harus segera dapat diatasi atau diselesaikan agar tidak terjadi berkepanjangan, sehingga tidak menimbulkan dampak atau kurban yang lebih banyak baik fisik maupun materi. Atas dasar itulah diperlukan sistem atau strategi penyelesaian konflik sosial-keagamaan (Dahrendorf, 1986:42-43).

Media dalam hal ini dipandang sangat tepat untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam meredam konflik atau praktek intoleransi. Alasan mendasar, saat ini media massa baik cetak, elektronik, dan media sosial

menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempengaruhi pandangan-pandangan individu dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai kebebasan beragama.

Wacana media massa seringkali menawarkan kerangka makna alternatif kepada khalayak untuk mendefinisikan diri sendiri, orang lain, lingkungan sosial, peristiwa-peristiwa, dan objek-objek di masyarakat (Achmad, 2001:29). Salah satu contoh ketika tayangan atau acara bertema agama dihadirkan di media massa, implikasinya adalah munculnya pemahaman dan pendefinisian nilai-nilai dan ajaran agama sesuai dengan definisi yang ditanamkan oleh media massa, sehingga isi tayangan media massa menjadi pertimbangan bahkan bisa ditiru oleh masyarakat. Jadi, media massa dengan kemampuannya dalam menyajikan berita atau peristiwa sosial sudah selayaknya dihadapi dengan kritis. Jika tidak, maka akan membentuk gambaran dunia yang keliru, termasuk gambaran mengenai agama baik Islam maupun non-Islam. Saat ini media massa memiliki peluang yang sangat besar untuk menanamkan prasangka antaragama (Achmad, 2001:64).

Sebagaimana digambarkan oleh media Barat mengenai Islam yang radikal, fundamental, anarkis bahkan kerap diidentikkan dengan teroris. Bagi dunia, Islam dianggap tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama (Bagader, 1983:82). Islam seolah-olah tidak dapat lagi menjawab permasalahan aktual dalam kehidupan umatnya, karena selalu memiliki konflik, baik internal maupun eksternalnya (Noer, 1996:56). Realitas semacam ini menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap nilai-nilai yang diserap oleh masyarakat mengenai agama yang dianutnya.

Media dalam hal ini memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat tentang permasalahan kebebasan dan perlindungan beragama (*freedom of religious*). Pada sisi lain, kebebasan beragama

disalahpahami dan dianggap sama dengan kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*), padahal orang yang menganjurkan kemerdekaan berpikir belum tentu setuju dengan kebebasan beragama. Kemerdekaan berpikir adalah dasar filsafat yang menganggap dirinya mempunyai kebenaran mutlak, sedangkan kebebasan beragama hanya merupakan suatu prinsip yuridis yang mengatur hubungan luar antara beberapa individu-individu atau kelompok (Ma'arif, 1987:38).

Menurut gambaran tersebut di atas, kebebasan beragama nampak dalam tiga aspek. Pertama: otonomi individu untuk menentukan agama yang ia sukai, kedua: otonomi suatu kelompok masyarakat agama untuk melakukan hal-hal mengenai masyarakat tersebut; dan ketiga: persamaan hak-hak agama dari segi hukum dan pemerintah.

Sebagai bangsa yang memegang teguh dan mengembangkan falsafah kehidupan dengan menjunjung tinggi keteraturan sosial berdasar atas falsafah Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka tentu saja kita akan menjadikan kebebasan berbasis tanggungjawab sosial sebagai inti dari kebebasan yang kita kembangkan. Tidak mungkin kita akan mengembangkan kebebasan dalam konsepsi kaum libertarian. Kebebasan tanpa batas berarti kebebasan yang tidak ada batasannya. Orang bebas melakukan apa saja tanpa mengindahkan hak orang lain. Budaya kita juga tidak cocok menggunakan model kaum otoritarian yang beranggapan bahwa tidak ada kebebasan, semuanya diatur dan dikendalikan. Artinya, praktek kebebasan itu penting, tetapi kebebasan yang telah diatur oleh etika ideologi.

Jadi, dalam kajian ini memiliki ruanglingkup yang cukup penting khususnya mengenai peran media. Media dalam hal ini dianggap sebagai agen sosial khususnya dalam memberitakan atau menginformasikan nilai-nilai kebebasan dan perlindungan beragama di masyarakat. Oleh karena itu, media cetak, elektronik maupun media sosial menjadi

central, karena selama ini media tersebut memiliki ciri khas masing-masing dalam memberitakan dan membangun kehidupan beragama.

Jadi berangkat dari latarbelakang di atas, masalah yang perlu dijawab adalah bagaimana peran media dalam upaya memperkuat toleransi beragama dan budaya di Indonesia? Kemudian bagaimana upaya dan tanggungjawab sosial yang perlu ditempuh oleh media dalam upaya membangun persepsi masyarakat agar aliran, faham, dan gerakan keagamaan di Indonesia tidak menyebabkan anarkisme yang mengarah ke intoleransi?

Kontribusi Kajian

Melalui metode pengamatan sosial, media, dan kajian pustaka, maka kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta urgensi pada tataran akademis, praktis, dan sosial. Secara akademis, melalui kajian ini merupakan upaya penulis untuk menggali mengenai kondisi sosial masyarakat khususnya mengenai peran dan tanggungjawab sosial media baik cetak, elektronik, dan media sosial khususnya membangun masyarakat yang damai di tengah banyaknya aliran, faham, dan gerakan keagamaan di Indonesia, sehingga kajian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam memperkaya acuan pustaka bagi pengkaji berikutnya.

Kemudian secara praktis, hasil kajian diharapkan dapat menerangkan kepada publik, melalui peran media di masyarakat di tengah banyaknya aliran, faham, dan gerakan keagamaan dapat dijadikan acuan bagi kalangan pengambil kebijakan (*decision making*). Oleh karena itu, jika kita cermat dan tidak bijak, eksistensi agama seringkali menjadi akar masalah atau konflik, sehingga diperlukan hasil kajian yang relevan. Di samping itu, kajian ini dapat dijadikan model pembinaan toleransi masyarakat pada tataran lokal maupun nasional melalui pendekatan media.

Secara sosiologis kegunaan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap masyarakat luas melalui media terutama dalam mengatasi berbagai macam konflik sosial yang berlatarbelakang aliran, faham, dan gerakan keagamaan baik masyarakat lokal maupun nasional, sehingga baik remaja, tokoh masyarakat setempat, maupun lembaga-lembaga terkait dapat memberikan kontribusi positif.

PEMBAHASAN

Kajian terkait toleransi beragama umumnya telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Namun demikian, penulis ingin berkontribusi melalui gagasan dengan mendasarkan pada studi pustaka dan pengamatan peristiwa sosial yang sering tayangkan dalam media.

Konsep Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata "*Tolerare*" yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain (Ihsan, 2009:24-25).

Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi adalah *samanah* atau *tasamuh*, artinya sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia (Enginer, 2004:8). Dengan demikian, makna kata *tasamuh* memiliki keutamaan, karena melambangkan sikap pada kemuliaan diri dan keikhlasan.

Oleh karena itu, toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama lainnya.

Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya toleransi beragama dimana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk saling menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain (Giddens, 1987:73).

Pada sila pertama dalam Pancasila, disebutkan bahwa bertaqwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai, sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam kajian ini, penulis memberikan arti bahwa toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dalam menjalankan aspek kehidupan (Digdoyo, 2005:78). Dalam ajaran agama apapun, setiap manusia memiliki tanggungjawab sosial untuk saling menghargai dan menjaga perdamaian.

Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita praktekan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Melalui praktek toleransi diharapkan terwujud ketertiban, kearifan, ketenangan dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Konflik Sosial Agama dan Budaya Pemicu Intoleransi

Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan keyakinan sebetulnya telah banyak memberikan sumbangsih besar bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Akan tetapi, karena pengetahuan dan kedewasaan masyarakat yang kurang mengenal toleransi, persoalan agama justru kerap menjadi pemicu lahirnya konflik horizontal (Wach, 1971:35). Di negara yang

menganut paham kebebasan beragama seperti Indonesia sendiri, telah terjadi beberapa contoh konflik semacam ini. Hendropuspito, (1986: 32) mengemukakan bahwa paling tidak ada empat hal pokok sebagai sumber konflik sosial yang bersumber dari agama yaitu:

1. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental

Perlu disadari atau tidak semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu.

Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (*revealed religion*), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi, sering memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan. Kelompok ini begitu agresif dan mempertahankan argumen masing-masing, kurang toleran, dan terkadang fanatik dan malah menganut garis keras. Karena itu, faktor perbedaan doktrin dan sikap mental dan kelompok masyarakat Islam dan Kristen punya andil sebagai pemicu konflik.

2. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Contoh di wilayah Indonesia, antara Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan, termasuk konflik antar suku di

Papua. Jadi, nampaknya perbedaan suku dan ras disertai perbedaan agama ikut memicu terjadinya konflik.

3. Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Agama sebagai bagian dari budaya melalui praktek ritual manusia. Kenyataan tersebut membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional, sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu, perbedaan budaya dan gaya hidup masyarakat tradisional dan modern sering mengalami konflik. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

4. Masalah Mayoritas dan Minoritas Golongan Agama

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat memiliki agama yang pluralis biasanya menjadi penyebab konflik berikut masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Jadi, tentunya bagi Indonesia yang multikulture dan multi talenta menjadi kebanggaan identitas nasional, namun pada sisi lain dapat menjadi pemicu konflik jika tidak bijak menyikapi kenyataan tersebut.

Kenyataan lain konflik sosial dapat terjadi berlatarbelakang ekonomi. Sebab masalah ekonomi menjadi kebutuhan dasar hidup manusia. Dari berbagai kasus konflik sosial ekonomi biasanya akan berimbas pada keyakinan masyarakat.

Membina Sikap Toleransi sebagai Budaya

Membina sikap toleransi umat beragama di Indonesia menjadi tanggungjawab sosial bersama dan merupakan budaya positif yang perlu dilanjutkan. Pandangan ini muncul

dilatarbelakangi oleh seringnya terjadinya konflik hubungan antar umat beragama di Indonesia (Sardar, 1988:48). Untuk itu, jika belajar dari kasus konflik antar umat bergama umumnya disebabkan antara lain:

1. Terbatasnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain.
2. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
3. Sikap tanggungjawab dari setiap pemeluk agama, yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah masing-masing.
4. Keterbatasan pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah agama.
5. Fanatisme para pemeluk agama yang tidak mampu mengontrol diri, sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain.
6. Adanya kecurigaan antar umat beragama, baik intern maupun eksternal antar umat beragama dengan pemerintah.
7. Masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial, artinya jika ekonomi mengalami ketimpangan, ekonomi akan menjadi pemicu konflik.

Jadi, sikap toleransi agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing kelompok bersikap lapang dada satu sama lain untuk menjaga perdamaian bersama. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam sikap; saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain, saling menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya, dan saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri.

Lapang dada maksudnya dalam kajian ini adalah jiwa yang perlu dibangun oleh warga negara Indonesia dalam arti bijak menyikapi

perbedaan keyakinan, sehingga ajaran dalam ideologi Ketuhanan untuk Kemanusiaan perlu dijunjung tinggi. Menjunjung tinggi sila Ketuhanan dan Kemanusiaan berarti turut mempraktekan toleransi dalam kehidupan penuh kedamaian.

Sikap toleransi antar umat beragama dan budaya umumnya telah dipraktekan di masyarakat lokal misalnya; Pusat ibadah masjid Istiqlal dan Gereja Betel yang berdampingan, toleransi antarumat beragama antara pemeluk Agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan dan Masjid Al Hikmah, Serengan, Kota Solo, Jateng, dua bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto Nomor 222, Solo, tempat peribadatan di Klaten, Yogyakarta, Temanggung, Surabaya, dan beberapa tempat ibadah lainnya di Indonesia menunjukkan pembinaan toleransi beragama.

Dalam konteks toleransi perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk umat beragama setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Bangunan Masjid Al Hikmah didirikan pada tahun 1947 sedangkan GKJ Joyodiningratan didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937, namun Toleransi antarumat beragama telah tercipta sejak lama. Pusat peribadatan masyarakat Muslim di Bali (Pegayaman, Klungkung, Negara, Gel-Gel) telah hidup damai dengan masyarakat Hindu. Beberapa Komunitas Muslim, Budha, Konghucu, atau sekalipun masyarakat penganut aliran kepercayaan sebetulnya telah menjaga prinsip-prinsip toleransi dalam menjaga perdamaian. Upaya masyarakat dalam mewujudkan toleransi dan perdamaian juga dilakukan masyarakat di Jawa Timur dengan menamakan Desa Pancasila (*Kompas*, 17 November 2016).

Studi kasus lain, misalnya saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja langsung menelepon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Kemudian pengurus gereja

merubah jadwal ibadah paginya pada Minggu menjadi siang hari, agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan shalat Idul Fitri. Kemudian pengurus masjid memperbolehkan halaman masjid untuk parkir kendaraan bagi umat kristiani GKJ Joyoningratan saat ibadah Paskah maupun Natal.

Jadi, hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antarumat beragama yang hingga saat ini terus dipelihara. Baik pihak gereja maupun pihak masjid, saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan khushyuk dan lancar bagi masing-masing pemeluknya. Seandainya terdapat oknum tertentu yang akan mengusik kerukunan antar umat beragama di tempat tersebut, baik pihak masjid maupun gereja akan berupaya untuk mencegahnya.

Jadi, berpijak pada sila Ketuhanan dan Kemanusiaan atau Kemanusiaan yang Berketuhanan dalam kajian ini merupakan ajaran budaya bangsa yang terus dipublikasikan kepada seluruh warga negara. Jika merujuk peran media, maka media saat ini memiliki andil besar. Namun eksistensi media perlu benar, netral dan adil dalam mengekspos berita yang menyangkut toleransi agama dan budaya.

Upaya Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

Menciptakan kerukunan umat beragama di bumi nusantara tentunya menjadi tanggungjawab negara dan seluruh warga negara. Tanggung jawab meliputi ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama (hidup berdampingan secara damai).

Dalam hal ini, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan berbagai cara; saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan

kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah.

Namun demikian akhir-akhir ini prinsip toleransi bisa dibangun melalui media sebagai penyampai informasi kepada orang lain, tetapi juga sering diketemukan oknum yang mempergunakan media sebagai ajang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang mengarah kepada ujaran kebencian.

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam paparan sebelumnya upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun hak lainnya.

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing, serta mematuhi peraturan yang telah disahkan negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama juga tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan (Hadisaputro, 2002:18).

Selain itu, agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk:

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.
8. Perlu mempraktekan prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam upaya memantapkan kerukunan itu, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga

apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Selain itu mereka sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama.

Kemudian pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas umat beragama di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya, yang diajarkan oleh agama masing-masing, sehingga ada kemungkinan timbul konflik di antara umat beragama.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya (Hadisaputro, 2002:19-20).

Untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan keutuhan bangsa, perlu dilakukan upaya-upaya:

1. Meningkatkan efektifitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat
2. Meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat
3. Menggalakkan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis dan profesi
4. Memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program sosial kemasyarakatan maupun dalam dunia pendidikan.
5. Pertemuan tokoh lintas agama secara berkelanjutan sebagai model pembinaan umat beragama yang tidak hanya dilakukan ketika terjadi konflik.

Apabila ditinjau secara empirik, berarti nilai-nilai yang menjadi landasan terbentuknya toleransi antar umat beragama dibangun atas

dasar fakta atau kenyataan pada waktu dan tempat tertentu adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Secara kodrati manusia adalah sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya baik itu sandang, pangan, papan dan pelestarian lingkungan hidup. Begitu mendasarnya kebutuhan ini, sehingga memaksa setiap orang, golongan atau kelompok untuk saling beradaptasi, berkomunikasi dan bergaul satu dengan yang lainnya.

Dorongan naluri manusia untuk bergantung dengan orang lain memunculkan sikap toleransi. Untuk menuju persaudaraan yang sejati, maka sikap saling mengejek, menghina harus dihindari. Persaudaraan sesama umat manusia harus diiringi dengan sikap saling pengertian dan tolong-menolong. Berangkat dari mengerjakan sesuatu yang baik dan besar tidak mungkin sendirian, maka kita perlu membutuhkan orang lain. Misalnya menanggulangi banjir, mengatasi masalah ekonomi, konflik sosial, ekologis, dan penyakit sosial tidak mungkin sendirian. Harus sama-sama bergandengan tangan untuk mengatasi itu semua. Dalam hal ini tidak membahas masalah akidah agama melainkan mengedepankan rasa kemanusiaan (kesalehan sosial).

Nilai kemanusiaan dapat dituangkan dengan sikap saling menghormati dan menghargai antar tetangga. Apabila terdapat tetangga yang membutuhkan pertolongan, maka harus dibantu tanpa memandang orang itu kaya atau miskin. Hidup di dalam lingkungan masyarakat yang dibutuhkan adalah sikap tolong-menolong, sehingga dapat mewujudkan lingkungan pergaulan hidup yang aman, damai dan sejahtera.

Kedua adalah nilai nasionalisme. Mengingat, bangsa Indonesia memiliki beragam agama dan budaya yang merupakan warisan nenek moyang. Sudah seharusnya sebagai rakyat Indonesia memiliki kesadaran untuk merasa senasib sepenanggungan. Tidak

bisa mengkotak-kotakkan diri. Rasa nasionalisme telah mendorong masyarakat untuk merasa seperti saudara, sehingga perbedaan yang ada tidak dijadikan tonggak untuk saling menjatuhkan melainkan dijadikan sebagai aset untuk bersatu. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila bahwa meskipun terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, ras dan budaya tetap bersatu. Nilai budaya gotong-royong tidak memandang manusia berdasarkan agama, ras dan pangkat, melainkan memiliki kedudukan yang setara.

Ketiga yaitu nilai historis. Pada dasarnya sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Berlandaskan warisan nenek moyang biasanya masyarakat telah memiliki sikap toleran terhadap perbedaan agama yang ada, bahkan telah menganggap saudara. Segala perbedaan tidak dijadikan suatu permasalahan melainkan sebagai tonggak untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga hubungan antar umat beragama dapat terbina sangat baik.

Perbedaan pandangan dalam suatu hubungan kemasyarakatan merupakan hal yang wajar. Apabila mampu menyelesaikannya secara bijaksana, maka tidak akan mempengaruhi dan mengurangi hubungan persaudaraan diantara sesama. Bahkan dijadikan sebagai sarana untuk saling mengenal karakter dan watak masing-masing individu. Hal ini didasarkan pada pemikiran agama yang terbuka dan selalu mengutamakan kerukunan hidup. Berusaha memiliki pemikiran dan pemahaman yang terbuka akan esensi hidup. Karena yang namanya saudara tidak mungkin saling menyakiti, mengejek ataupun saling curiga.

Keempat yaitu nilai keteladanan tokoh masyarakat (kepemimpinan). Eksistensi tokoh agama dalam mengajarkan sikap toleransi pada masyarakat lokal/desa tidak diragukan. Prinsipnya sebagai pemimpin harus dapat memberikan contoh, baik itu ucapan dan perilaku yang mencerminkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan

agama. Tokoh masyarakat baik formal maupun non formal mampu mengayomi masyarakat dengan cara memberikan waktu dan tempat kepada masing-masing umat beragama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya serta sekaligus melibatkan warga dalam kegiatan masyarakat.

Kelima yaitu nilai kesabaran. Hidup berdampingan secara damai (toleransi) di lingkungan masyarakat yang heterogen dibutuhkan kesabaran. Mengingat, tiap individu memiliki kepentingan dan kebebasan sendiri-sendiri. Nilai kesabaran diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa suatu kebebasan tidak dapat dilakukan secara mutlak karena dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sikap sabar dapat diwujudkan dengan tidak mengejek ataupun menghina umat yang tidak beragama, melainkan memberikan waktu dan tempat kepada orang yang tidak seagama untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi, prinsip yang tepat bukan mengejek umat yang tidak menjalankan ibadah, melainkan mengingatkan bagi umat yang belum menjalankan ibadah.

Peran Pemerintah dalam Membina Hubungan antarumat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi dalam umat beragama. Adapun sikap pemerintah yang dimaksud adalah:

1. Memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik.
2. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama
4. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama

5. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama
6. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama
7. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama
8. Pemerintah memiliki prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang berlaku dan menjamin hak yang sama bagi setiap agama secara konsisten
9. Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik

Jadi, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 terdapat persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan khusus yang harus ditempuh masyarakat dalam pendirian rumah beribadah.

Dalam perspektif ketatanegaraan, perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian dan merupakan pengecualian atas suatu larangan. Oleh karenanya, prosedur yang ada harus konsisten diterapkan, sehingga dapat menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Sosialisasi diperlukan dalam rangka menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama (Nazsir, 2008:106).

Persoalan perizinan pembangunan rumah ibadat selama ini dinilai oleh responden sebagai penyebab utama munculnya konflik antarumat beragama. Sementara, ranah perizinan berada dalam kewenangan pemerintah. Hal ini berarti bahwa ada persoalan regulasi yang juga perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antarumat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungan permukiman. Isu tentang perizinan sangat rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kepastian regulasi dan prosedur perizinan perlu disosialisasikan dan

diberlakukan secara tegas oleh pemerintah tanpa membedakan agama.

Belajar dari praktek toleransi antarumat beragama di Kota Bandung menunjukkan kategori “Tinggi” (Hermawati, 2016:46-47). Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan kerja sama dalam interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung sudah berlangsung secara kondusif. Jarak sosial yang ada masih tergolong wajar karena kecenderungan penolakan terhadap pemeluk agama berbeda hanya berkaitan dengan ranah yang sangat pribadi atau berkaitan dengan identitas *in-group* dari suatu pemeluk agama. Dalam hal interaksi sosial lainnya, ada keterbukaan untuk menerima dan bergaul dengan pemeluk agama yang berbeda.

Analisis Peran Media dan Tanggungjawab Sosial

Kajian ini menurut hemat penulis lebih tepat jika menggunakan pendekatan teori tanggungjawab sosial media. Teori tersebut menyatakan bahwa media harus meningkatkan standar secara mandiri, menyediakan materi dan pedoman netral bagi warga negara untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini sangat penting bagi media, karena kemarahan publik akan memaksa pemerintah untuk menetapkan peraturan untuk mengatur media (Wridgh, 1985).

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan setelah Roosevelt, ketika para penerbit berpengaruh tidak populer di kalangan publik. Publik selalu curiga terhadap pers, bahkan ketika para pemimpin industri ini diganti dengan yang baru. Pers telah merumuskan “kode etik” selama berdekade (Masyarakat Editor Surat Kabar Amerika (ASNE) menerapkan “aturan jurnalisme” (*The Canons of Journalism*) di tahun 1923) dan televisi menjadi media paling populer pada saat itu.

Pers memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan dan menerapkan standar tanggung jawab sosial, tapi prosesnya juga

harus “sejalan dan sistematis dengan usaha-usaha masyarakat, konsumen dan pemerintah” (Wridgh, 1985). Teori tanggung jawab sosial tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa wilayah hak-hak moral berbeda dengan wilayah hak-hak hukum. Teori tanggung jawab sosial memiliki pandangan liberal terhadap diskursus publik yang sehat. Ia mematuhi gagasan pasar pemikiran (*marketplace of ideas*) tapi juga memahami bahwa pasar tersebut harus berada dalam sebuah medium. Dengan kata lain, di mana sebelumnya media bersaing di pasar, sekarang pasar berada dalam media dan pers.

Teori tanggungjawab sosial punya asumsi utama: bahwa kebebasan, mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat, maka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Pada dasarnya fungsi pers di bawah teori tanggungjawab sosial sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian.

Terkait dengan adanya media cetak maupun elektronik, saat ini menjadi sarana penyampai informasi (berita), hiburan, maupun model perniagaan baru di dunia global tentunya perlu dibangun dengan wacana bahwa tanggungjawab sosial media sangat penting jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan.

Terkait tema kajian ini perlu ditegaskan bahwa media massa sebagai media informasi untuk segenap lapisan masyarakat memiliki peranan penting dalam membangun arti dari toleransi antar umat beragama baik secara nasional maupun dalam kancah internasional. Media massa secara langsung harus memberikan perannya sebagai pengontrol dan juga sebagai agen dari perubahan sosial khususnya dalam hal menghadirkan ajaran agama dalam bingkai yang lebih kontekstual, toleran, dan interpretatif.

Media massa memiliki peranan yakni sebagai sarana penyampai informasi dan

edukasi bagi segenap masyarakat Indonesia. Aspek mendidik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari media massa. Berita yang dimuat mengenai suatu hal akan menjadi bahan bagi masyarakat karena aspek dari berita itu sendiri yaitu pemberi informasi pada masyarakat.

Media massa sebagai agen perubahan dituntut untuk selalu bertanggung jawab karena perannya sebagai penyalur opini kepada publik. Untuk itu, berita yang dimuat oleh media massa harus menjadi tolak ukur dalam kebudayaan toleransi antar umat beragama yaitu sebagai aspek penyatu bagi setiap lapisan masyarakat. Peranan media sebagai instrumen komunikasi memberikan sumbangan besar terhadap mobilitas personal bahkan sosial kemasyarakatan. Mustahil dinafikkan bahwa pertumbuhan media masa kini telah membentuk pola pikir masyarakat.

Lebih jauh lagi, media telah memberikan warna signifikan terhadap pola-pola keagamaan dan keberagamaan dalam kehidupan. Ketergantungan masyarakat kepada media semakin menguat seiring dengan pertumbuhan globalisasi yang tidak mungkin dibendung laju pertumbuhannya. Pertumbuhan pola-pola kehidupan keagamaan dan keberagamaan masyarakat akan menjadi sangat bervariasi beriringan dengan frekuensi pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat akan kehidupannya menjadi sangat bersentuhan dengan dinamika kehidupan yang mengitarinya. Tak pelak lagi, peranan media dalam membentuk sosio-kultur dan agama dalam masyarakat menjadi keniscayaan. Media memberikan input wawasan sosio-kultur dan nilai-nilai keagamaan kepada segenap masyarakat. Eksistensinya seringkali memberikan potret hakiki akan pertumbuhan dinamika kehidupan di antara semua unsur sosial di masyarakat.

Seiring dengan pesatnya media, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan kehidupan masyarakat juga akan semakin kompleks. Kompleksitas ini terjadi bersamaan

dengan daya terima masyarakat terhadap eksistensi media dalam kehidupan mereka. Pertumbuhan media dari kenyataannya yang sederhana kepada kondisi yang semakin mengglobal menunjuk kepada respon luas masyarakat terhadap realitas sekitar dari pertumbuhan dinamika kehidupannya (Masudi, 2013:147-148).

Berita-berita yang beredar di linimasa, baik media sosial dan media-media lainnya, terutama yang berkaitan dengan isu keberagaman, sangat menarik perhatian banyak kalangan. Menarik, karena dapat disebut negara kita sebagai contoh bagaimana keberagaman itu ada sejak lama. Selain itu, dapat disebut berita-berita tersebut mengejutkan karena banyak hal yang sebenarnya kita tidak mengalaminya secara lanjut justru dapat mencederai keberagaman yang sudah ada sejak lama. Masyarakat mungkin sudah terbiasa dengan isu keberagaman yang melibatkan suku dan agama, dalam banyak keseharian mereka sudah banyak berelasi dengan kelompok-kelompok yang berbeda suku, ras, dan agama, contohnya dalam pendidikan dan pekerjaan.

Pada sisi lain, masyarakat dihadapkan kepada banyaknya pertentangan yang justru melibatkan perbedaan suku, ras, dan agama yang tampaknya pada akhir-akhir ini lebih terlihat memanas dan membawa pandangan negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Salah satu berita yang baru saja menjadi sorotan banyak pihak adalah mengenai pembakaran 7 wihara dan kelenteng yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara oleh sejumlah warga beragama Islam pada tanggal 29 Juli 2016 (*Tempo.co.id*, 30 Juli 2016). Hal ini sebenarnya dipicu oleh keberatan salah satu penduduk keturunan Tionghoa yang merasa suara azan magrib yang berasal dari pengeras suara mengganggu karena terletak persis di depan rumah.

Sebenarnya, penduduk tersebut bersama dengan jemaah masjid serta anggota kepolisian setempat dan pihak kelurahan telah bersama-sama duduk dalam satu mediasi.

Sayangnya, usaha mediasi tersebut dicemari pesan berantai yang menyebutkan bahwa masjid dilarang mengumandangkan azan. Tanpa meneliti benar tidaknya pesan tersebut, masyarakat setempat tersulut kemarahannya dan membakar tidak hanya tempat ibadah, namun juga mobil, motor, dan becak.

Sementara itu, berita lainnya terkait dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan kritik dari Komnas HAM terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 1999 tentang Visi Misi Religius Islami karena dianggap melanggar praktik intoleransi dalam kehidupan beragama di masyarakat (*Radartasikmalaya.com*, 27 Juli 2016), serta reaksi terhadap kritik ini disuarakan oleh HMI serta Ketua Presidium Solidaritas Mahasiswa Tasikmalaya.

Di belahan Indonesia Timur, tepat di Tolikara, satu berita sempat mencuat ke permukaan ketika kasus pelanggaran salat Idul Fitri tercantum dalam surat edaran yang mengatasmakan jemaat Gereja Injili di Indonesia (*Obsessionnews*, *obsessionnews.com*, 18 Juli 2015). Sebenarnya, secara umum GIDI wilayah Toli melarang agama lain serta Gereja aliran lainnya untuk mendirikan bangunan ibadah, akan tetapi larangan melaksanakan shalat Idul Fitri menjadi indikasi jelas adanya ketimpangan dalam penerimaan keberagaman di suatu daerah.

Mengapa hal-hal tersebut di atas muncul secara masif? Peran media masih sangat signifikan dalam menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Media memiliki target audiens yang beragam, sehingga berita yang disajikan tentu akan jelas bervariasi sesuai kebutuhan audiens yang ditargetnya. Dalam era keterbukaan informasi, media tampil sebagai pusat informasi ekspansif ditandai dengan cepatnya berita masuk serta dirilis untuk masyarakat.

Saat ini media cetak, elektronik, dan sosial telah menjamur ditingkat lokal dan nasional. Berikut gambaran data media yang

secara aktual selalu menyampaikan berita terkait kehidupan toleransi agama dan budaya, misalnya:

Tabel: 1
Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Sosial di Indonesia

Media Cetak	Media Elektronik	Media Sosial
Koran Harian Nasional: 29	Televisi Nasional: 115	Jejaring Sosial Terpopuler: 10
Koran Harian Lokal: 63	Televisi Lokal: 180	
Majalah: 12	Televisi Jaringan: 11	
	Radio Nasional dan Lokal: 654	
	Radio Komunitas: 39	

Sumber: Di kutip dari Wikipedia.com, 08 November 2017

Data jumlah media tersebut dalam berbagai peristiwa dapat dipastikan menyampaikan informasi terkait dengan praktek penerapan toleransi maupun in-toleransi agama dan budaya di masyarakat. Sebagai bagian dari praktek sistem demokrasi, media merupakan corong utama informasi sosial politik yang juga berguna bagi sarana berpikir bagi masyarakat, tidak hanya untuk berpolitik, tetapi juga memberikan dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Media turut serta membangun kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang berkembang di negara mereka tinggal (McDevitt (1996:270), serta Lindsey (1994: 163) menyatakan bahwa media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat (Medinah Suarti. *BatamToday.com*, 16 Juni 2015).

Ketika masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia ini diberikan akses informasi

melalui media tanpa batas, sebenarnya hal ini memberikan dampak positif dan negatif. Masyarakat dapat menjadi lebih teliti dalam mendapatkan informasi, sehingga apa yang diserapnya bukan hanya berita-berita yang sifatnya lebih mengarah kepada provokasi, namun juga bagaimana mereka menjadi dapat bersikap dengan lebih bijaksana dan tidak terpancing emosinya.

Contoh yang sangat terlihat dalam hal terkait di atas adalah di media sosial, di mana terjadi penyebaran tautan berita serta respon masyarakat dapat langsung dilihat dalam interaksi berupa komentar-komentar yang bahkan dapat direspon langsung dalam bentuk kesetujuan maupun ketidaksetujuan.

Menariknya, dari interaksi sosial masyarakat tersebut justru dapat dilihat sikap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu keberagaman dan toleransi yang akhir-akhir ini banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan.

Keterbukaan reaksi masyarakat akan suatu berita pada saat ini merupakan ciri demokrasi, suatu hal yang sangat mahal dibandingkan pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa sekarang, tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk memberikan kritik keras terhadap isu-isu yang berkembang.

Lebih jauh lagi, isu tentang etnis dan agama yang seharusnya tidak menjadi isu yang dibesar-besarkan karena masyarakat Indonesia tinggal dalam keberagaman semakin sering diberitakan, dan tidak jarang respon-respon negatif yang justru menafikan keberadaan keberagaman lebih sering muncul dan cenderung lebih menampilkan saling berbalas pernyataan dan komentar (Santosa, 2017:199-214). Hal ini pada akhirnya akan berujung pada tajamnya segregasi kelompok mayoritas dan minoritas, dua kubu yang lebih dilihat dari identitas etnis dan agama (Saerang, 2000:12).

Sebagai alat untuk kontrol sosial, maka media seharusnya bisa berperan lebih signifikan dalam kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia. Isi berita dalam media

memang berada dalam koridor yang sudah lebih bebas diakses masyarakat, dan memang tidak dapat disalahkan pula jika pada akhirnya isi berita dianggap semakin dapat memperuncing situasi yang sudah panas, seperti yang terjadi dalam berita pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai, Tolikara, dan beberapa kasus lainnya.

Objektivitas pemberitaan media apa pun itu diperlukan untuk menghindari salah tanggap dari masyarakat, sehingga isu yang berhubungan dengan etnis dan agama tidak semakin memperparah konflik antara dua kelompok mayoritas dan minoritas, sekaligus mereduksi kecurigaan satu sama lain. Jadi, kajian ini tidak menyudutkan eksistensi media tertentu, tetapi lebih pada peran masyarakat dalam menggunakan media sosial terutama dalam menyampaikan peristiwa sosial yang tidak salah dan menimbulkan isu intoleransi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi media massa saat ini merupakan salah satu sarana penyampai peristiwa, dan masyarakat berhak memilih media apapun, namun mestinya juga merupakan filter dalam menyeleksi pemberitaan berbagai peristiwa, sehingga media dapat menjadi perekat sosial salah satunya dalam isu toleransi beragama.
2. Sebagai sarana penyampai informasi, maka eksistensi media dituntut tanggungjawab sosial. Jika media salah menyampaikan peristiwa sosial masyarakat, secara otomatis akan mengakibatkan dampak yang sangat fatal di masyarakat. Sebab masyarakat biasanya tanpa menyaring kebenaran informasi yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban informasi.
3. Eksistensi media bukanlah sebagai sarana untuk membuli, mencemooh,

menyebarkan berita bohong di masyarakat.

Saran

Saran penulis melalui kajian ini adalah:

1. Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan bagi bangsa Indonesia sudah final, untuk itu pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat tetap menjadi pengontrol dan pengendali masalah kehidupan toleransi beragama dan budaya secara adil.
2. Eksistensi media punya andil dalam menciptakan perdamaian di masyarakat melalui tanggungjawab sosial media.
3. Masyarakat sebaiknya tetap memegang teguh prinsip toleransi, bijak dalam menyikapi perbedaan sebagai ciri khas masyarakat yang penuh dengan peradaban dan pluralitas.
4. Prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila perlu diimplementasikan melalui proses pendidikan dan pengajaran, sehingga tidak hanya dimaknai sebagai prinsip ideologis tetapi dapat dimaknai secara praktis.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdullah, Taufik (Ed). 1983. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Achmad, Nur. 2001. *Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas
- Ali, Mohammad Daud. 1986. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: CV Wirabuana
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. 1999. *Maluku Tengah dalam Angka*. Masohi: BPS
- Bagader, Abu Baker A. 1983. *Islam dalam Perspektif Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Colleman, James S. 2008. *Dasar-Dasar Teori Sosial*, (Terj. Imam Muttaqien, Derta Sri

- Widowatie dan Siwi Purwandari). Bandung: Nusa Media Crapps
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Konflik*. (Jakarta: Rajawali, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Intermassa
- Departemen Agama RI. 2003. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Digdoyo, Eko. 2005. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bogor: PT Galia Indonesia
- Enginer, Asghar Ali. 2004. *Liberalisasi Teologi Islam, Membangun Teologi Damai dalam Islam* (Terj. Rizqon Khamami). Yogyakarta: Alenia
- Fatwa, Achmad Fajruddin. 2007. *Jembatan Hukum Islam Menyikapi Kekerasan Atas Nama Agama*, dalam *Qualita Ahsana* Vol. IX No. 1. April 2007. Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Giddens, Anthony. 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Jakarta: Rajawali
- Hadisaputro, Muhda. 2002. *Peranan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*. Yogyakarta: Salahuddu Press
- Hendropuspito, 1986. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka
- Ihsan, Bakir. 2009. *Menebar Toleransi Menyemai Harmoni*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ishamuddin. 1996. *Sosiologi Agama, Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologis*. Malang: UMM Press
- Koentjaraningrat. 1975. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Kuntowijoyo. 1985. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Nazsir, Nasrullah. 2008. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Sardar, Ziauddin. 1988. *Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau Informasi* (Terj. A. E. Priyono dan Ilyas Hasan). Jakarta: Mizan
- Wach, Joachim. 1971. *Sociology of Religion*. Chicago and London: University of Chicago Press
- Wridgh, Charles R. 1985. *Sosiologi Komunikasi Massa* (Terj. Lilawati Trimo dan Jalaluddin Rahmat). Bandung: Remadja Karya
- Jurnal dan Media:**
- Hermawati, Paskarina, Runiawati, 2016. *Toleransi Kerukunan Hidup Beragama*. *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology* 121 Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115
- Mas'udi. 2013. *Agama Masyarakat: Menggagas Prinsip-Prinsip Etis dalam Jurnalistik*. *AT-TABSIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2013
- Medinah Suarti. 2015. *Peran Media sebagai Alat Perikat Bangsa*. *Batam Today.com*, 16 Juni 2015
- Rasimin. 2016. *Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Masyarakat Randuacir*.

- INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*. Volume 1, No. 1, Juni 2016: h. 99-118.
- Saerang, Joppy A. 2000. *Konflik Antar Kelompok Agama di Indonesia*. Jurnal Pelita Zaman. Volume 15 No. 1 tahun 2000
- Santosa, Bend Abidin. 2017. *Peran Media Masa dalam Mencegah Konflik*. Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal *ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 199-214
- Salmony, Rooy John. *Kerusuhan Ambon sebagai Konflik Sosial*, <http://www.suamerdeka.com/harian/9908/11/kha2.htm> (10 Agustus 2009)
- Satori, Akhmad. *Konsep Ibn Khaldun tentang Pemerintahan dan Negara*, [http // politepress. Blogsport.com/2007/N//new-artcle 2-25.html](http://politepress.blogspot.com/2007/N//new-artcle-2-25.html) (5 Pebruari 2009)
- Tunny, Aziz. *Nadi Toleransi di Lumbung Konflik, Pela-Gandong Salam-Sarane*, source: <http://www.geocities.com/lokkie2005/rvp070306.htm> (5 Maret 2006)
- Kompas*, 17 November 2016
- Tempo.co.id*, 30 Juli 2016
- Radar Tasikmalaya*, adartasikmalaya.com, 27 Juli 2016
- Obsessionnews*, obsessionnews.com, 18 Juli 2015

